



Islam dan Feminisme Sosialis: Harmonisasi Nilai Dalam Wacana Perempuan Bekerja

Amalia Risti Atikah¹ dan Elizabeth Kristi Poerwandari²

^{1,2} Universitas Indonesia

¹amalia.risti31@ui.ac.id, ²elizabeth.kristi@ui.ac.id

Abstract

In Indonesia, feminism is often viewed as a Western philosophy perceived to be religiously, culturally, and nationally irrelevant to Islamic women, resulting in the development of anti-feminist groups. Scathing critiques are frequently directed at working women, assuming Islam mandates that women remain confined to the private sphere. From a socialist feminist perspective, this leads to the alienation of women. This paper investigates the intersection between Islamic teachings and the principles of socialist feminism by employing a qualitative approach grounded in literature analysis. The study explores how Islamic values inherently support gender equality and women's participation in the public sphere, debunking cultural misinterpretations that hinder women from working. Ultimately, this work advocates for gender-sensitive reinterpretations of Islamic theology to validate the experiences of working women and align them with the spirit of feminism.

Keywords: *alienation, feminist theology, gendered interpretation, Islamic feminism, socialist feminism*

Abstrak

Di Indonesia, feminisme dipandang sebagai ideologi Barat yang asing secara agama, budaya, dan nasional serta tidak relevan bagi perempuan Islam; kemudian muncul kelompok anti-feminis. Kritik keras salah satunya diarahkan pada perempuan bekerja karena misinterpretasi ajaran Islam sehingga perempuan mengalami alienasi menurut konsep feminis sosialis. Saya menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan data yang dikumpulkan dari literatur buku dan jurnal terkait feminisme sosialis dan nilai Islam, khususnya yang membahas soal perempuan bekerja untuk menggali titik temu antara ajaran Islam dan feminisme sosialis. Feminisme sosialis ingin membebaskan perempuan dari alienasi termasuk untuk bekerja, sejalan dengan nilai Islam yang melegitimasi perempuan berpartisipasi maksimal di ranah publik. Oleh karena itu, terbukti bahwa larangan perempuan bekerja berasal dari misinterpretasi yang dipengaruhi oleh budaya. Diharapkan, tulisan ini mendorong intervensi yang berfokus untuk memberikan validasi perempuan bekerja dan menegaskan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya justru mendukung adanya kesetaraan sebagaimana semangat feminisme. Saya merekomendasikan upaya peninjauan pemahaman tafsir keagamaan yang tidak androsentris dan lebih sensitif gender termasuk yang memerhatikan penghayatan dan kondisi perempuan.

Kata kunci: alienasi, feminisme sosialis, feminisme dan agama, feminisme Islam, tafsir gender.

PENDAHULUAN

“... Seorang ibu didakwa tidak melaksanakan ‘tugas’ sebagai istri dengan baik sehingga ditalak, ternyata karena ia (be)kerja di malam hari. Kemudian dibacalah hukumnya yang isinya sangat patriarkal, saya tekankan pada hakim agama: ada jutaan ibu bekerja di Indonesia lalu apakah semua disebut tidak bertanggung jawab karena bekerja?” – kutipan wawancara Musdah Mulia (dalam Jurnal Perempuan 73)

Kutipan di atas adalah sedikit cuplikan pengalaman feminis muslim Indonesia, Musdah Mulia, dari pengalaman beliau memotori gerakan pengarusutamaan gender, feminisme, dan

integrasinya dengan nilai Islam yang memuliakan perempuan. Di Indonesia, feminisme masih dipandang sebagai sebuah ideologi Barat yang asing secara agama, budaya, dan nasional sehingga tidak relevan bagi perempuan Islam. Hal ini jika ditelusuri tak terlepas dari sejarah era kolonial yang menganggap bahwa peradaban Eropa itu superior sementara budaya dan agama pribumi itu inferior, sehingga upaya pembebasan perempuan ala Barat yang berniat membantu perempuan negara berkembang tapi dengan konsep mereka sendiri tanpa memedulikan kearifan lokal membuat gerakan antifeminis makin berkembang (Anwar, 2018).

Fenomena anti-feminis secara internasional disebut dengan istilah *backlash* atau perlawanan feminisme (Wood, 2005), kelompok ini di Indonesia merasa bahwa praktik feminisme yang mendukung kesetaraan gender dan hak seksual itu bertentangan dengan Islam (Sya'rani, 2023), karena mereka meyakini sudah seharusnya perempuan jadi obyek ketaatan pada laki-laki sebagai Imam atau pemimpin dalam keluarga (Alfirdaus et. al., 2022). Gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia pun menjadi ragu menggunakan istilah feminis, sehingga lebih memilih menggunakan istilah gender. Padahal, gender itu berakar dari feminisme; upaya pembebasan perempuan adalah buah pemikiran feminisme.

Saya ingin menekankan bahwa sebenarnya feminisme itu sejalan dengan nilai Islam dalam mendorong kemajuan perempuan, menghargai agensi perempuan, dan membentuk sintesis 'Barat dan Islam' mengenai kesetaraan gender; bagaimana pertemuan perempuan dengan Islam dan feminisme dapat menyediakan cara untuk maju menuju kesetaraan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kapasitas dan potensi yang sama untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. QS Al-Hujurat:13 menyebutkan bahwa yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Banyak ayat Qur'an yang mengajak untuk tidak membedakan karena jenis kelamin atau kedudukan sosial (Anshor, 2012).

Sayangnya, perempuan seringkali tidak berdaya terutama di ranah publik. Konstruksi sosial yang mendasarkan nilai-nilainya pada pemikiran keagamaan pun tanpa disadari turut melanggengkan budaya patriarki yang opresif terhadap perempuan. Masyarakat menganggap seolah itu semua bersumber dari ajaran agama, dalam hal ini khususnya Islam. Kritik keras salah satunya diarahkan pada perempuan yang memilih bekerja karena anggapan bahwa tempat perempuan yaitu di rumah. Ada berbagai alasan yang mendasari perempuan bekerja mulai dari faktor ekonomi, kebutuhan untuk aktualisasi diri, perasaan eksistensi, hingga punya latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga ada akses karier yang baik (Hidayati, 2015).

Rata-rata dari mereka juga ada di posisi sebagai *sandwich generation* yang bertanggungjawab lintas generasi dalam memberikan perawatan, dukungan finansial, dan

dukungan emosional bagi anak sekaligus orang tua mereka (Owsiany, Fenstermacher, & Edelstein, 2023; Jackson & Mannix, 2004). Perempuan bekerja di negara pascakolonial termasuk Indonesia mengalami banyak diskriminasi yang menghambat kemajuan karier, seperti sulit menempati posisi eksekutif atau pembuat keputusan serta lebih dianggap rendah dibandingkan laki-laki meskipun pendidikan perempuan tersebut lebih tinggi (Tjiptoherijanto, 2012; Nona & Sumargi, 2022), apalagi saat sudah menjadi ibu (Candraningrum, 2013). Hal ini yang disebut sebagai ‘alienasi’ oleh feminisme sosialis.

Tren dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perempuan bekerja semakin banyak menyumbang terhadap peningkatan ekonomi keluarga sebanyak sekitar 39%, (BPS, 2023). Tingkat partisipasi angkatan kerja pada perempuan terus meningkat pula dari tahun ke tahun hingga mencapai 53,13% di tahun 2020 (Septina, 2023), terlihat bahwa sudah lebih dari setengah perempuan turut bekerja. Dengan demikian, masuknya perempuan ke dalam dunia kerja bukan hanya sebagai komplementer semata. Akan tetapi, Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menemukan bahwa perempuan yang bekerja rentan mengalami kekerasan (KemenPPPA et. al., 2021), termasuk dipicu pula oleh misinterpretasi perempuan bekerja dalam agama.

Kabar baiknya, sudah banyak pula feminis muslim Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, yang mengupayakan perjuangan hak-hak perempuan ke arah yang lebih baik, serta mengajak untuk mengkaji kembali teks agama Islam yang lebih memerhatikan perempuan (Nuraini, Huda & Zulaiha, 2021). Saya menilai bahwa ini baru awal dari perjuangan, karena banyak pula bermunculan gerakan anti-feminis yang berasal dari kesalahpahaman dalam memahami feminisme yang sejati. Oleh karena itu, terlihat urgensi keberadaan lebih banyak tulisan yang menganalisis semangat feminisme yang banyak sekali berkelindan dengan nilai Islam, terutama kesamaan tujuan yaitu untuk memuliakan perempuan.

Integrasi feminisme sosialis dan nilai agama Islam masih relatif jarang dieksplorasi sehingga tulisan ini bertujuan untuk menyelami pertemuan antara keduanya, khususnya pada isu perempuan bekerja. Feminisme sosialis sebagai gerakan yang mengupayakan pembebasan perempuan bekerja dari alienasi karena identitasnya dan kapitalisme patriarki, sejalan dengan nilai Islam sejati yang membebaskan perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur. Literatur yang dipilih meliputi buku dan jurnal yang membahas teori feminisme sosialis, nilai-nilai Islam, serta isu perempuan bekerja. Pemilihan literatur dilakukan melalui pencarian komprehensif

berdasarkan kata kunci di beberapa basis data elektronik, antara lain portal *ScienceDirect*, *Proquest*, *Wiley Online Library*, *Google Scholar*, dan portal perpustakaan Universitas Indonesia dengan kata kunci feminisme sosialis, perempuan bekerja dalam Islam, dan alienasi perempuan. Kriteria inklusi diterapkan sebagai berikut: 1) artikel yang mempunyai judul dan isi relevan dengan tujuan tulisan ini; 2) berasal dari jurnal internasional terindeks; dan 3) tersedia naskah lengkap.

Beberapa pengecualian dilakukan pada kriteria sebagai berikut: 1) tidak tersedia artikel yang lengkap; 2) menggunakan bahasa asing yang tidak dikuasai penulis; 3) penelitian pada binatang atau bukan manusia; serta 4) penelitian di luar topik yang relevan dengan tujuan pembahasan.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan antara konsep alienasi dalam feminisme sosialis dan nilai-nilai Islam yang mendukung kesetaraan. Data dikategorikan berdasarkan tema utama seperti “alienasi intelektual”, “legitimasi perempuan bekerja dalam Islam”, dan “harmonisasi nilai”. Hasil analisis ini digunakan untuk membangun argumen yang menunjukkan titik temu antara kedua perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alienasi Perempuan Bekerja dalam Teori Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis, sebagaimana dijelaskan oleh Alison Jaggar (1983), memandang alienasi sebagai konsep kunci untuk memahami bentuk penindasan perempuan yang berlangsung dalam struktur patriarki dan kapitalisme. Jaggar mengkritik Marxisme klasik yang hanya berfokus pada eksploitasi kelas tanpa melihat dimensi gender, dengan menegaskan bahwa perempuan mengalami alienasi yang unik, terutama karena sistem patriarki yang menyusup ke dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, meskipun kapitalisme dapat dihentikan, alienasi perempuan hanya dapat diatasi jika patriarki juga dihapuskan (Jaggar, 1983).

Jaggar mengidentifikasi tiga bentuk utama alienasi perempuan, yaitu seksualitas, motherhood atau peran sebagai ibu, dan intelektualitas. Ketiga bentuk ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, menunjukkan bagaimana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya.

Alienasi pertama yang diidentifikasi oleh Jaggar adalah dalam dimensi seksualitas, di mana perempuan sering kali dilihat sebagai objek validasi laki-laki. Dalam masyarakat patriarkal, tubuh perempuan dipandang sebagai alat untuk melayani kepentingan laki-laki, baik

secara pribadi maupun di ruang publik. Dalam dunia kerja, hal ini terlihat dari standar gender yang menuntut perempuan untuk tampil menarik agar dianggap layak atau diterima. Jaggar (1983) menyoroti bahwa penekanan pada penampilan fisik ini bukan hanya bentuk kontrol, tetapi juga alat eksploitasi.

Dalam konteks Indonesia, alienasi seksualitas ini sering kali terwujud dalam stereotip gender yang mengutamakan estetika perempuan di tempat kerja dibandingkan dengan kompetensi mereka. Perempuan yang tidak memenuhi standar kecantikan tertentu sering dipandang kurang profesional, sementara yang dianggap menarik menghadapi risiko objektifikasi. Kondisi ini menciptakan hambatan tambahan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan sejati di dunia kerja.

Alienasi *motherhood* atau peran sebagai ibu menunjukkan bagaimana perempuan kehilangan kendali atas pengalaman reproduksi mereka. Jaggar (1983) menjelaskan bahwa kebijakan reproduksi yang dirancang dalam kerangka patriarki sering kali membatasi kebebasan perempuan, baik dalam menentukan waktu memiliki anak maupun dalam menjalani peran sebagai ibu. Kebijakan tersebut biasanya dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan perempuan, yang pada akhirnya memperkuat ekspektasi gender tradisional bahwa perempuan harus menjadi pengasuh utama.

Di Indonesia, stigma terhadap perempuan bekerja sering kali diperkuat oleh norma sosial yang mengidealkan peran domestik perempuan. Perempuan yang memilih bekerja setelah memiliki anak sering kali menghadapi kritik sosial yang menilai mereka sebagai "ibu yang kurang bertanggung jawab." Misalnya, banyak ibu bekerja yang harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh, tanpa dukungan struktural yang memadai. Sebagai bagian dari generasi sandwich, perempuan sering kali menjadi penopang bagi anak-anak dan orang tua mereka, menghadapi tekanan emosional dan finansial yang luar biasa (Owsiany, Fenstermacher, & Edelstein, 2023).

Alienasi intelektual merujuk pada pembatasan terhadap perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam ruang publik, termasuk pengambilan keputusan. Meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka sering kali tidak diakui atau dianggap layak untuk mengekspresikan kapasitas intelektual mereka. Jaggar (1983) menekankan bahwa masyarakat patriarkal cenderung mendiskreditkan suara perempuan, memposisikan mereka sebagai pendukung atau pelengkap laki-laki.

Di dunia kerja, hal ini terlihat dari rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Data menunjukkan bahwa hanya 23% posisi eksekutif di Indonesia diisi oleh

perempuan, meskipun mereka memiliki tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki (BPS, 2023). Kondisi ini mencerminkan bias sosial yang lebih menghargai laki-laki sebagai pemimpin, sementara perempuan lebih sering ditempatkan dalam peran administratif atau pendukung.

Ketiga bentuk alienasi ini tidak dapat dipisahkan, melainkan saling memengaruhi. Misalnya, perempuan yang teralienasi dalam peran motherhood sering kali kehilangan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di ruang publik, yang pada gilirannya memperburuk alienasi intelektual mereka. Jaggar (1983) mencatat bahwa banyak perempuan merasa suara mereka tidak layak didengar, sebuah pandangan yang diperkuat oleh struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama.

Nancy Fraser memperluas kritik terhadap kapitalisme patriarki dengan memperkenalkan konsep universal caregiver, yang menyerukan redistribusi tanggung jawab domestik antara laki-laki dan perempuan. Fraser (2015) berpendapat bahwa kapitalisme neoliberal tidak hanya memanfaatkan tenaga kerja perempuan sebagai sumber daya murah, tetapi juga memperkuat ketimpangan gender dengan mengabaikan kebutuhan perempuan di luar pekerjaan. Fraser menegaskan bahwa dominasi laki-laki dalam kapitalisme bersifat intrinsik dan tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi yang ada.

Dalam konteks Indonesia, kritik ini relevan untuk melihat bagaimana struktur sosial dan ekonomi sering kali meminggirkan perempuan. Sistem patriarki yang terintegrasi dalam kebijakan tenaga kerja, misalnya, menciptakan kondisi kerja yang tidak ramah gender, seperti kurangnya fasilitas cuti melahirkan atau dukungan untuk ibu menyusui. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja perempuan, tetapi juga memperburuk subordinasi mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Konsep feminisme sosialis memiliki kesamaan dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan (QS Al-Hujurat:13). Namun, patriarki yang mengakar dalam interpretasi agama sering kali membatasi perempuan bekerja. Misalnya, tafsir-tafsir agama yang bias gender sering digunakan untuk menjustifikasi ketidaksetaraan, padahal sejarah Islam menunjukkan peran signifikan perempuan di ruang publik, seperti Khadijah dan Aisyah RA. Untuk membebaskan perempuan dari alienasi, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai feminisme sosialis dengan reinterpretasi ajaran Islam yang lebih progresif dan sensitif gender. Hal ini mencakup revisi terhadap tafsir agama yang mendukung kesetaraan serta penghapusan hambatan struktural di dunia kerja.

Perempuan Bekerja dalam Pandangan Islam

Islam menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sejak zaman dahulu.

... فَقَالَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ
شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا....
(رواه البخارى)³

Aisyah dan Hafsa berkata: "*Kami semula sama sekali tidak menganggap terhormat atau penting kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata perempuan juga memiliki hak-hak asasi.*" (HR. Bukhari)

Rasulullah ﷺ sangat gigih menghapuskan budaya jahiliyah yang menindas perempuan, dianggap tidak berharga dan obyek semata. Sejarah Islam mencatat bahwa dalam waktu yang relatif singkat, perjuangan Rasulullah ﷺ membuahkan hasil yang signifikan yaitu kaum perempuan berhak menyuarakan opini dan keyakinan, mengaktualisasikan karya, hingga berkarier dan diakui sebagai manusia secara utuh (Mulia, 2014). Bahkan, tidak sedikit perempuan diutus menjadi pemimpin di lingkungan sukunya. Secara radikal, Islam memperkenalkan kepada masyarakat Arab dan juga dunia tentang pentingnya memanusiakan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka yang posisinya setara laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat.

Akan tetapi, kemudian banyak pemahaman dan interpretasi yang keliru oleh masyarakat soal kesetaraan gender, utamanya kedudukan perempuan yang dipandang ada di bawah laki-laki. Banyak misinterpretasi memosisikan perempuan sebagai identitas yang tidak beruntung, terutama bagi perempuan bekerja. Padahal, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, selama hal tersebut halal sesuai syariat Islam. Pekerjaan yang diharamkan untuk perempuan juga diharamkan untuk laki-laki, dan sebaliknya. Tapi, narasi yang berkembang adalah perempuan yang bekerja itu menyalahi 'kodrat' dengan justifikasi menggunakan kutipan-kutipan ayat Qur'an maupun hadits tanpa memerhatikan konteks saat diturunkan dan kesesuaiannya (Budiman, 2008).

Musdah Mulia sangat yakin bahwa Islam diturunkan sebagai *rahmat* kepada semua orang di dunia dengan membawa serta karakter teladan Tuhan. Sayangnya, sebagian besar umat Islam beranggapan bahwa penafsiran Al-Qur'an yang ada saat ini sudah statis dan kaku, sehingga tidak bisa ditelaah lagi. Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (2004) selaku Imam Besar

Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa masyarakat yang mewariskan agama-agama semit seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam secara kultural dianggap bersifat androsentris, sehingga relasi gendernya ‘didominasi laki-laki’.

Budaya dan bahasa tidak bisa dipisahkan, karena bahasa merupakan bagian dari budaya, dan selalu ada keterlibatan budaya dalam setiap bahasa yang dipraktikkan, khususnya dalam hal struktur bahasa dan bahasa. Faktanya, sebuah penafsiran adalah buatan manusia, dan tidak abadi. Penafsiran adalah produk seorang penafsir. Oleh karena itu, umat Islam sebenarnya bisa menciptakan banyak pendekatan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk yang lebih memerhatikan tentang pengalaman hidup dan kondisi perempuan. Noorhasanah (2020) menyebutkan ayat-ayat dalam Qur'an sekaitan hak perempuan dalam dunia kerja berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab sebagai berikut,

- a. Pada Al-Baqarah 228 dan An-Nahl 97 menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki untuk beraktivitas dan memilih pekerjaan apa yang ingin dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mendatangkan *mudharat*.
- b. Pada An-Nissa 32, An-Nissa 124, dan Al-Imran 195 menjelaskan soal hak kesetaraan upah kerja bagi perempuan dan laki-laki sesuai yang telah mereka kerjakan dan tidak ada diskriminasi atas hal tersebut.
- c. Pada At-Taubah 71 dan An-Nissa 34, menjelaskan bahwasanya terhadap sesama makhluk Allah sudah sepatutnya manusia saling tolong menolong dan melindungi satu sama lain, sehingga perempuan sepatutnya mendapatkan perlindungan dan kenyamanan atas segala hal yang sekiranya mengganggu kenyamanan dan menghambat kinerjanya.
- d. Pada Al-Baqarah 286 menjelaskan bahwa seseorang tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ada waktu di mana pekerja perempuan harus diberi keringanan bekerja dan cuti yang berhubungan dengan fungsi biologisnya sebagai perempuan yaitu hamil, melahirkan, serta menstruasi.

Apa yang dituliskan ini hanya cuplikan saja, karena sesungguhnya banyak kisah Nabi, ayat Qur'an, dan hadits yang memuliakan kedudukan perempuan, termasuk melegitimasi untuk bekerja. Berikutnya, saya akan membahas mengenai titik temu antara nilai Islam dan feminisme sosialis yang harmonis memperjuangkan dan mengapresiasi perempuan bekerja.

Harmonisasi Nilai Islam dan Feminisme Sosialis dalam Isu Perempuan Bekerja

Kabar baiknya, sudah banyak pula feminis muslim baik perempuan maupun laki-laki yang mengupayakan perjuangan hak-hak perempuan ke arah yang lebih baik, serta mengajak untuk mengkaji kembali teks agama Islam yang lebih memerhatikan perempuan (Nuraini, Huda & Zulaiha, 2021) termasuk dalam hal perempuan bekerja. Saya ingin membahas mengenai tiga titik pertemuan antara Islam dan feminisme sosialis.

Pertama, perempuan bekerja punya legitimasi dalam agama Islam, sebagaimana perjuangan feminisme sosialis membebaskan perempuan dari alienasi, khususnya dalam hal intelektualitas. Tidak ada teks dalam Qur'an atau Hadits yang menyatakan bahwa perempuan harus dibatasi hanya pada ranah privat saja. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perempuan ikut serta dalam kehidupan publik bersama umat Islam awal.

Bahkan, perempuan biasanya menemani tentara Muslim dalam pertempuran, merawat yang terluka, menyiapkan perbekalan, dan mengabdikan pada para pejuang (Khan & Zia, 2021). Di zaman Rasulullah ﷺ, perempuan berhak menyuarakan opini dan keyakinan, hingga tidak yang diutus menjadi pemimpin di lingkungan sukunya. Islam membebaskan perempuan dari masyarakat *jahiliyah* yang memandang perempuan sebagai jenis kelamin kedua, selayaknya konsep alienasi yang disinggung oleh Jagger.

Rasulullah ﷺ menekankan pentingnya memanusiakan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka yang posisinya setara laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat (Mulia, 2014). Islam memberikan perempuan hak untuk bekerja, mengelola harta benda, dan memiliki kekayaan. Seperti halnya feminisme memperjuangkan perempuan untuk bekerja, dalam Islam pun diapresiasi seperti pada Al-Baqarah 228 dan An-Nahl 97 yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki untuk beraktivitas dan memilih pekerjaan apa yang ingin dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mendatangkan *mudharat*.

Kedua, Islam mengakui dan mendorong perkembangan intelektualitas perempuan. Bila menilik sejarah Islam yang tidak melarang partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, terbukti bahwa alienasi yang dialami oleh perempuan tidak terjadi. Misalnya Khadijah, istri Rasulullah ﷺ, adalah salah satu saudagar penting pada masa itu sementara Rasulullah ﷺ sendiri merupakan salah satu pegawainya (Khan & Zia, 2021). Perempuan boleh berpartisipasi bekerja dan berkarier setinggi yang ia mampu, sesuai kapasitas intelektualnya termasuk memperoleh apresiasi yang setara.

Hal ini tertera pada surat An-Nissa ayat 32 dan 124, serta Al-Imran 195 yang menjelaskan soal hak kesetaraan upah kerja bagi perempuan dan laki-laki sesuai yang telah mereka kerjakan dan tidak ada diskriminasi atas hal tersebut, dengan perlindungan seperti cuti yang berhubungan dengan fungsi biologis perempuan sebagaimana surat Al-Baqarah 286 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya; ada waktu di mana pekerja perempuan harus diberi keringanan bekerja.

Terakhir, saya akan membahas tentang perintah Islam dalam Quran dan Hadits yang menetapkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di rumah, di tempat kerja, dan dalam bernegara serta menunjukkan bahwa aturan umum adalah sama bagi laki-laki dan perempuan, sejalan dengan upaya feminis sosialis Nancy Fraser mewujudkan *universal caregiver* di masa kini yang menuntut laki-laki terlibat penuh dalam rumah tangga di samping tetap bekerja, dengan harapan mendorong keadilan gender dengan secara efektif melindungi perempuan.

Sebab, pekerjaan perawatan dalam keluarga dianggap tidak memiliki nilai dan dibebankan kepada perempuan walaupun sama-sama bekerja, sehingga tuntutan akan keterlibatan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender menjadi penting untuk kesuksesan perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja (Islami, 2021; Ardaneshwari, 2013). QS Al-Hujurat:13 menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kapasitas dan potensi yang sama untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan mereka.

Indonesia dan negara-negara Muslim yang membatasi perempuan bekerja harus memahami bahwa larangan tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang patriarki, sehingga hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Status perempuan dalam Islam dimuliakan, menekankan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di setiap bidang kehidupan, termasuk mengakui hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Kontribusi khas feminis sosialis terhadap pemahaman tentang sifat manusia adalah meningkatkan pemahaman kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah terberi melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (Jaggar, 1983), sehingga kondisi ini tentu bisa diubah secara sosial, termasuk membebaskan kerentanan perempuan sebagai pekerja karena tidak adanya perlindungan hukum dan kejelasan karir (Islami, 2021).

Lebih jauh lagi, tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia tidak hanya datang dari laki-laki, tapi juga perempuan yang menyatakan diri sebagai anti-feminis yang diwakili oleh organisasi yang berafiliasi dengan partai konservatif. Hegemoni patriarki membuat kondisi dominasi laki-laki dianggap wajar, normal, dan diperlukan atas nama

ketaatan beragama sehingga mereka tidak setuju dengan gagasan mengenai otonomi tubuh perempuan dan pembebasan dari alienasi (Alfirdaus et. al., 2022). Semua cara berpikir tersebut muncul karena terbatasnya ruang diskusi dan negosiasi. Saya meyakini bahwa jika mereka mendalami feminisme yang sejati dan pertemuannya dengan nilai Islam, niscaya akan menggugah semangat para perempuan tersebut untuk terbebas dari hegemoni patriarki.

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, berada dalam posisi unik untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat mendukung kesetaraan gender secara penuh. Pelarangan perempuan bekerja yang sering kali ditemukan tidak berasal dari inti ajaran Islam, melainkan dari pengaruh budaya patriarki yang telah lama mengakar. Islam, sebagaimana diajarkan Rasulullah, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepada mereka untuk berpartisipasi di ranah publik tanpa kehilangan martabatnya.

Melalui reinterpretasi teks agama yang progresif dan sensitif gender, masyarakat dapat membebaskan perempuan dari berbagai bentuk alienasi. Hal ini membutuhkan sinergi antara pemimpin agama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif. Di sisi lain, kebijakan perusahaan harus dirancang untuk mendukung perempuan, misalnya melalui fasilitas cuti melahirkan, jam kerja fleksibel, dan sistem perlindungan tenaga kerja yang adil.

Pendidikan juga menjadi kunci utama. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran perempuan bekerja dapat membantu mengikis stigma yang menghambat kemajuan mereka. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai feminisme sosialis dan Islam, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Melangkah bersama menuju perubahan ini tidak hanya akan memperkuat kesetaraan gender, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hujurat:13, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kapasitas dan potensi yang sama. Kini, saatnya kita mewujudkan potensi tersebut melalui dukungan nyata, kebijakan yang berpihak, dan pemahaman agama yang lebih mendalam.

KESIMPULAN

Islam dan feminisme sosialis sejalan mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, mendukung upaya pembebasan perempuan dari alienasi yang dialaminya, termasuk untuk bisa bekerja. Ayat Qur'an, Hadits, dan sejarah Islam menampilkan legitimasi atas hak perempuan berpartisipasi secara maksimal di ranah publik, membebaskan perempuan

dari alienasi yang disebutkan oleh feminisme sosialis. Oleh karena itu, praktik yang melarang perempuan bekerja dengan alasan agama harus diubah karena misinterpretasi yang dipengaruhi oleh budaya, bukan dari ajaran Islam.

Tema-tema feminisme yang membahas tentang pengalaman perempuan dan kaitannya dengan konteks keagamaan secara spesifik harus terus dieksplorasi, terutama dalam konteks Indonesia yang sangat beragam kondisi perempuannya guna mendukung transformasi dalam pendidikan, penelitian, kebijakan, dan praktik pekerjaan perempuan. Mari berkomitmen untuk mengatasi segala bentuk penindasan perempuan dalam masyarakat, mendukung inklusivitas untuk semua termasuk untuk perempuan yang miskin, penyandang disabilitas, dan kondisi lainnya. Ciptakan ruang untuk perempuan berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuannya. Semua pengalaman perempuan itu valid!

REKOMENDASI

Teori feminisme harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu (O'Reilly, 2021, p.10), konteks, serta tidak menutup kemungkinan akan harmonisasi dengan nilai Agama untuk memberikan pemahaman mengenai operasi yang dialami oleh perempuan dan solusi yang dapat ditawarkan. Dalam pembahasan ini, banyak perempuan yang merasa bahwa dengan bekerja, mereka bisa menjadi sosok yang lebih berdaya, baik untuk dirinya sendiri, maupun membantu perekonomian keluarga. Berkariir juga jadi pilihan bagi perempuan agar tetap punya daya tawar di tengah relasi timpang antara istri dan suami, dimana bekerja adalah alat untuk mereka merasa aman dan mandiri. Secara agama pun hal ini tidak dilarang, bahkan diapresiasi.

Faktor protektif adalah hal yang bisa mendukung perempuan tetap aktif bekerja dan berkariir setinggi mungkin, yaitu dukungan keluarga – terutama Ayah dan suaminya – untuk mau berbagi tugas rumah dan pengasuhan, serta konten ceramah dari tokoh agama yang tidak menyudutkan perempuan bekerja. Selain itu, penelitian Muin, Nasution, dan Primastika (2021, p.52) menemukan bahwa dukungan sosial rekan kerja menjadi faktor pendukung keberhasilan perempuan bekerja. Perusahaan punya tanggungjawab untuk mewujudkan situasi dan lingkungan kerja yang sensitif gender. Hal yang tak kalah penting menurut saya yaitu mengupayakan peninjauan pemahaman tafsir keagamaan yang tidak androsentris dan lebih sensitif gender.

Penafsiran adalah produk seorang penafsir, yang tidak statis. Oleh karena itu, umat Islam sebenarnya bisa menciptakan banyak pendekatan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk yang lebih memerhatikan tentang pengalaman hidup dan kondisi perempuan. Semoga hal ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan bersinergi bersama para mitra seperti organisasi

keagamaan dan kemasyarakatan, partai Islam, akademisi, serta insan media untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan perempuan Indonesia.

Pemerintah bersama organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan kerja dan kebijakan publik yang mendukung perempuan. Kampanye edukasi harus diarahkan pada pentingnya nilai kerja sama antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam jangka panjang, peninjauan ulang tafsir agama yang lebih progresif perlu diprioritaskan, sehingga dapat mencerminkan keadilan dan mendukung kesetaraan gender. Melalui langkah ini, kesejahteraan dan kebahagiaan perempuan Indonesia dapat terwujud secara lebih substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K., Divina, L. A., & Fitriyah. (2022). Anti-feminist movement, hegemonic patriarchy, and gender equality challenges: The case of the sexual violence elimination bill. *Humaniora*, 34(2), 117–126.
- Ambarwati, A. (2009). Tenaga kerja wanita dalam perspektif Islam. *Muwazah*, 1(2), 101–108.
- Anshor, M. U. (2012). Kompilasi hukum Islam yang ramah perempuan. *Jurnal Perempuan*, 73, 19–30.
- Anwar, E. (2018). *A genealogy of Islamic feminism: Pattern and change in Indonesia*. Routledge.
- Ardaneshwari, J. (2013). Potret dilema perempuan bekerja dalam media perempuan Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 76, 23–41.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Budiman, M. (2008). Treading the path of the sharia: Indonesian feminism at the crossroads of western modernity and Islamism. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 1, 73–93.
- Candraningrum, D. (2013). Superwoman syndrome dan devaluasi usia: Perempuan dalam karier dan rumah tangga. *Jurnal Perempuan*, 76, 7–19.
- Fraser, N. (2013). *Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso Books.
- Fraser, N. (2015). Feminism's two legacies: A tale of ambivalence. *The South Atlantic Quarterly*, 114(4), 699–712.
- Fraser, N. (2016). Contradiction of capital and care. *New Left Review*, 100, 99–117.
- Gunawan, T. (2021). Strategi penghapusan hambatan partisipasi angkatan kerja perempuan. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 7–33.
- Hidayati, N. (2015). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 108–119.
- Islami, P. Y. N. (2021). Domestifikasi dan beban ganda pekerja perempuan dalam ekonomi gig di Indonesia. In Y. T. Keban, A. Hernawan, & A. Novianto (Eds.), *Menyoal kerja layak dan adil dalam ekonomi gig di Indonesia* (pp. 47–62). IGPA Press.

- Jaggar, A. M. (1983). *Feminist politics and human nature (Philosophy and society)*. Rowman & Allanheld.
- Jackson, D., & Mannix, J. (2004). Giving voice to the burden of blame: A feminist study of mothers' experiences of mother blaming. *International Journal of Nursing Practice*, 10, 150–158.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). *Survei pengalaman hidup perempuan nasional (SPHPN)*. KemenPPPA.
- Khan, A. S., & Zia, F. (2021). Islamic view on right to equal opportunity to work for female ex-offenders and Pakistan's international obligation for provision of equal opportunities for work. *Rahatulquloob*, 5(1), 73–87.
- Mulia, M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. PT Elex Media Komputindo.
- Muin, A. P., Nasution, M., & Primastika, W. (2021). Minimnya perhatian terhadap kebutuhan laktasi di perusahaan media. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 34–55.
- Nona, E. H. A. P., & Sumargi, A. M. (2022). Konflik peran dan well-being pada ibu bekerja. *Jurnal Empati*, 11(3), 101–108.
- Noorchasanah, N. (2020). Hak pendapatan pekerja perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*, 2(2), 111–118.
- Nuraini, N., Huda, N. N., & Zulaiha, E. (2021). Women issues discussed by feminist mufasirs in Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 14–19.
- O'Reilly, A. (2021). *Matricentric feminism: Theory, activism, practice* (2nd ed.). Demeter Press.
- Owsiany, M. T., Fenstermacher, E. A., & Edelstein, B. A. (2023). Burnout and depression among sandwich generation caregivers: A brief report. *The International Journal of Aging and Human Development*, 97(4), 425–434.
- Rich, A. (1976). *Of woman born*. W. W. Norton & Company Inc.
- Septina, H. R. (2023, March 18). Tengkes dan beban ganda perempuan. *Kompas*.
<https://www.kompas.id/>
- Sya'rani, A. R. (2023). Muslim women against feminism: The Family Love Alliance (Aliansi Cinta Keluarga) and its impact on women's and sexual rights in contemporary Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, 11, 1–17.
- Tjiptoherijanto, P. (2012). Kegiatan-kegiatan produktif: Perempuan ada di mana? *Jurnal Perempuan*, 73, 97–107.
- Umar, N. (2004). Gender biases in Qur'anic exegesis: A study of scriptural interpretation from a gender perspective. *Hawwa*, 2, 337–363.
- Wood, J. T. (2005). *Gendered lives: Communication, gender, culture*. Wadsworth.